



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/100 /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/57/Kpts/BPT-PS/2021 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Nomor : 900/100/Keu-Setda/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Usulan Perubahan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Sekretariat Daerah, perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/57/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/57/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati ;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/57/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Apabila Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR 900/108 /Kpts/BPT-PS/2021
TANGGAL 12 JANUARI 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN NOMOR : 900/57/Kpts/BPT-PS/2021 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGLOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	MUSKAMAL, S.H., M.Si. NIP. 19610228 193602 1 002	Pia Sekretaris Daerah	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	Seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah
2	SABRUL, S.H. NIP. 19651231 193601 1 033	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT I. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 2. Fasilitasi Bantuan Hukum 3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
3	DARMATI, S.Sos. NIP. 19700613 192203 1 003	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT I. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan : 1. Penataan Administrasi Pemerintahan 2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah II. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah Sub Kegiatan : - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
4	YOLLI AANG SOFRIA, S.STP, M.Sc. NIP. 19840723 200212 1 001	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT I. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
5	HARDI DARMA PUTRA, S.H., M.Si. NIP. 19670901 193602 1 001	Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN I. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan : - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

6	NASWIN HAKIM, S.H. NIP. 19661011 198602 1 002	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN I. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN I. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan : 1. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 2. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil II. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Sub Kegiatan : - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN I. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Sub Kegiatan : 1. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan 2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan II. Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan : - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan : 1. Fasilitas Keprotokol 2. Fasilitas Komunikasi Pimpinan 3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
7	HELLEN H. SARI, S.E., AK., M.Ec., Dev. NIP. 19780528 200501 2 004	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kuasa Pengguna Anggaran	
8	Ir. HENDRI HANAFI NIP. 19640417 199203 1 009	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	Kuasa Pengguna Anggaran	
9	RINALDI, S.Pd, M.Si. NIP. 19700921 199303 1 002	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kuasa Pengguna Anggaran	
10	JUNILIA ARMAYANTI, S.Kom. NIP. 19800623 200501 2 015	Kepala Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran	

1	2	3	4	5
11	HAMDI, S.Pt., M.Si. NIP.19740530 200003 1 005	Asisten Administrasi Umum	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Fasilitas Kunjungan Tamu 5. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD II. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya III. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor IV. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Mebel 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya V. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah VI. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12	WELDI, S.Sos., M.M. NIP.19641028 199003 1 004	Kepala Bagian Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran	

	3.		
13. NOFRUDIAITO, A.Md. NIP. 19790520 201101 1 008 14. SYAFNELI, S.E. NIP. 19791127 200701 2 003 15. GUSRIDA YENTI, A.Md. NIP. 19780403 200902 2 002 16. MISNURMALLIYANTI, S.E. NIP. 19710228 200604 2 012 17. YULI FITRIANI NIP. 19850723 201001 2 019	Staf Bagian Keuangan Staf Bagian Umum Staf Bagian Umum Staf Bagian Keuangan Staf Bagian Keuangan Staf Bagian Keuangan	Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu Bupati dan Wakil Bupati Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Asisten I 1. Bagian Hukum 2. Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat 4. Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Asisten II 1. Bagian Pembangunan dan Infrastruktur 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD III. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD V. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
18. MART IKHSAN, S.E. NIP. 19780311 200902 1 009	Staf Bagian Keuangan		

		II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Sub Kegiatan :	
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
		III. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		Sub Kegiatan :	
		- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Sub Kegiatan :	
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		V. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
		Sub Kegiatan :	
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
		2. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
13	NORFUCIANTO, A.Md. NIP. 19790520 201101 1 008	Staf Bagian Keuangan	Bendahara Pengeluaran
14	SYAFNELI, S.E. NIP. 19791127 200701 2 003	Staf Bagian Umum	Pendahara Pengeluaran Pembantu Bupati dan Wakil Bupati
15	GUSRIDA YENTI, A.Md. NIP. 19780403 200902 2 002	Staf Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum
16	MISNURMALIYANTI, S.E. NIP. 19710225 200604 2 012	Staf Bagian Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji)
17	YULI FITRIANI NIP. 19850723 201001 2 019	Staf Bagian Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Asisten I 1. Bagian Hukum 2. Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat 4. Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
18	MART IKHSAN, S.E. NIP. 19780311 200902 1 009	Staf Bagian Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Asisten II 1. Bagian Pembangunan dan Infrastruktur 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Nama	Jabatan	Kategori	Keterangan
19	SILVI YANUR NIP. 19850304 201001 2 029	Staf Bagian Keuangan	3	Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Asisten III 1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 2. Bagian Organisasi

BUPATI PESIR SELATAN,

